

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)**

Nota Dinas

Nomor : 29157/Ses.1/10/2024

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Bulan September Tahun 2024
Tanggal : 17 Oktober 2024

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode bulan September tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp244.786.416.000 dan sampai dengan bulan September 2024 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp142.870.071.016 (58,37%).
2. Pada capaian kinerja fisik, LKPP memiliki 4 Indikator Sasaran Strategis (rata-rata capaian 77,17%), 14 Indikator Sasaran Program (rata-rata capaian 90,45%), 61 Indikator Sasaran Kegiatan (rata-rata capaian 88,65%), 70 Rincian Output (rata-rata capaian 78,04%), dan 187 Komponen (rata-rata capaian 72,13%).
3. Terdapat indikator yang realisasinya telah melebihi target, yaitu:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan
 - Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik
 - Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya
 - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing
 - Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda
 - Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK
 - Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN
 - Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS
 - Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya
 - Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi
 - Keterandalan sistem sertifikasi kompetensi
 - Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K
 - Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih
 - b. Indikator Rincian Output
 - SDM JF PPBJ
 - UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3
 - Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk
 - Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak
 - Peserta Sertifikasi SDM PBJ
 - Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani
 - LPPBJ yang Terakreditasi
4. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
 - b. Merencanakan dan mengupayakan percepatan kegiatan serta penyelesaian proses pertanggungjawaban anggaran yang belum mencapai target pada Triwulan III, sehingga



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

- realisasi penyerapan anggaran dapat ditingkatkan dan mencapai target pada Triwulan IV;
- c. Meningkatkan pencapaian kinerja fisik baik pada indikator capaiannya rendah maupun yang masih belum berprogres;
 - d. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen);
 - e. Berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing untuk mengoptimalkan efektivitas waktu penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan mekanisme langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Dirktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 yang telah disosialisasikan kepada seluruh PPK dan Staf PPK di LKPP;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan
 - g. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode September 2024 dan melaporkan progres tindaklanjut melalui Aplikasi SiREMON.

Dalam hal membutuhkan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa Anggriani (0819-3209-6526). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Setio Widodo

Tembusan :

1. Sekretaris Utama
2. Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3. Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital
4. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5. Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

LAPORAN

Monitoring & Evaluasi Kinerja Unit Organisasi

Periode Bulan September

TAHUN
20
24

Biro Perencanaan dan Keuangan

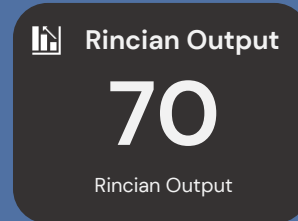
Gedung LKPP Lt.9

Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, RT.2/RW.5, Karet
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta

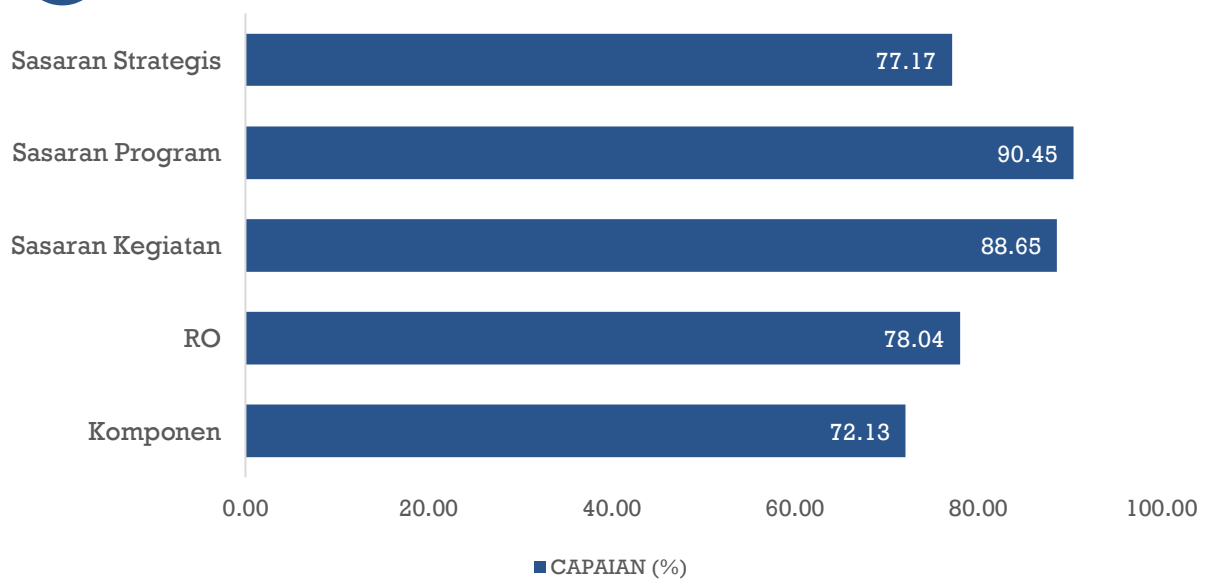


SUMMARY

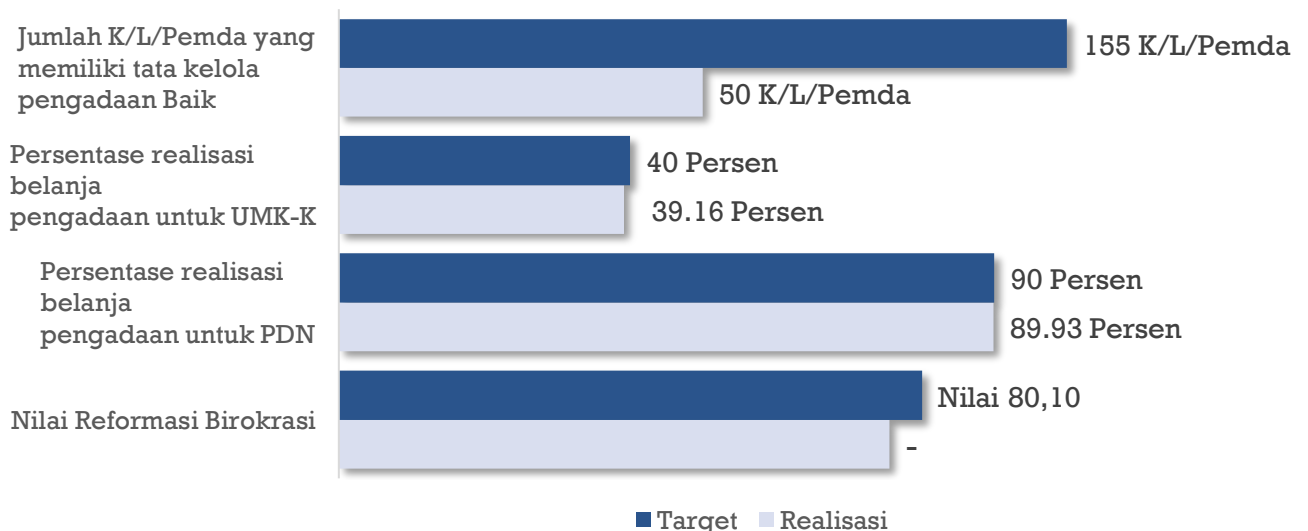
CAPAIAN FISIK LEMBAGA



Capaian Fisik



Sasaran Strategis



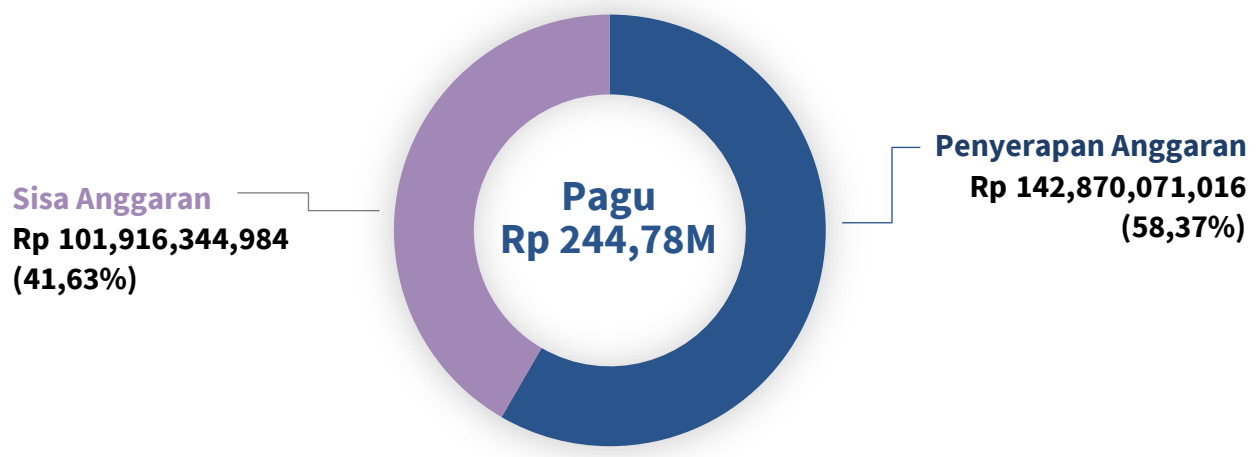
SUMMARY

Penyerapan Anggaran

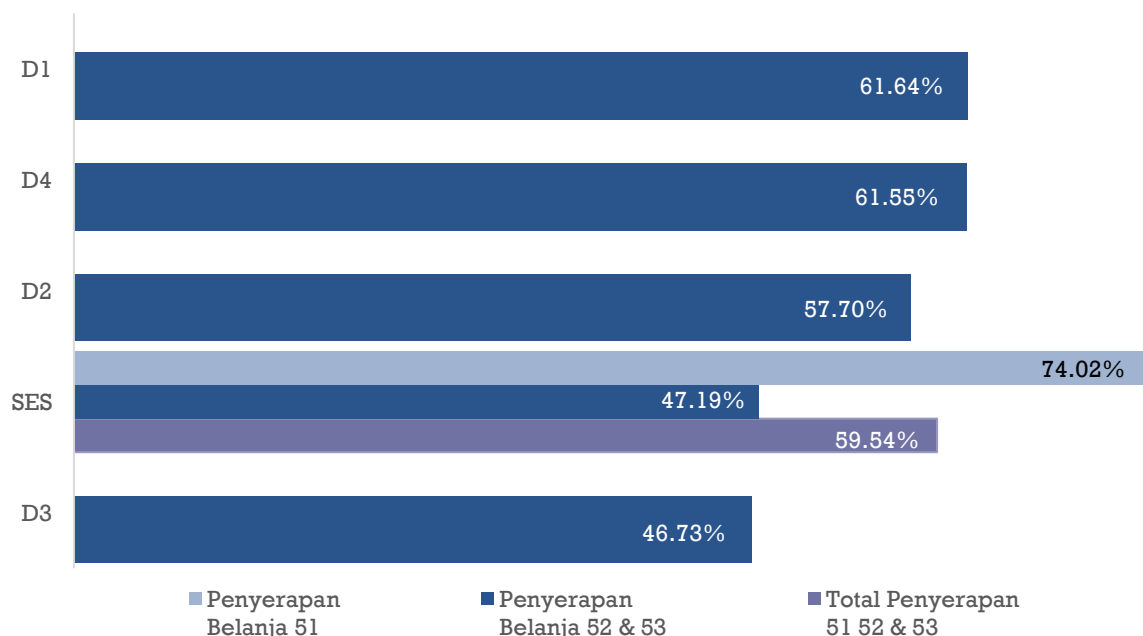


Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2024 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

Per tanggal 31 September 2024



Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Organisasi Eselon I TA 2024 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

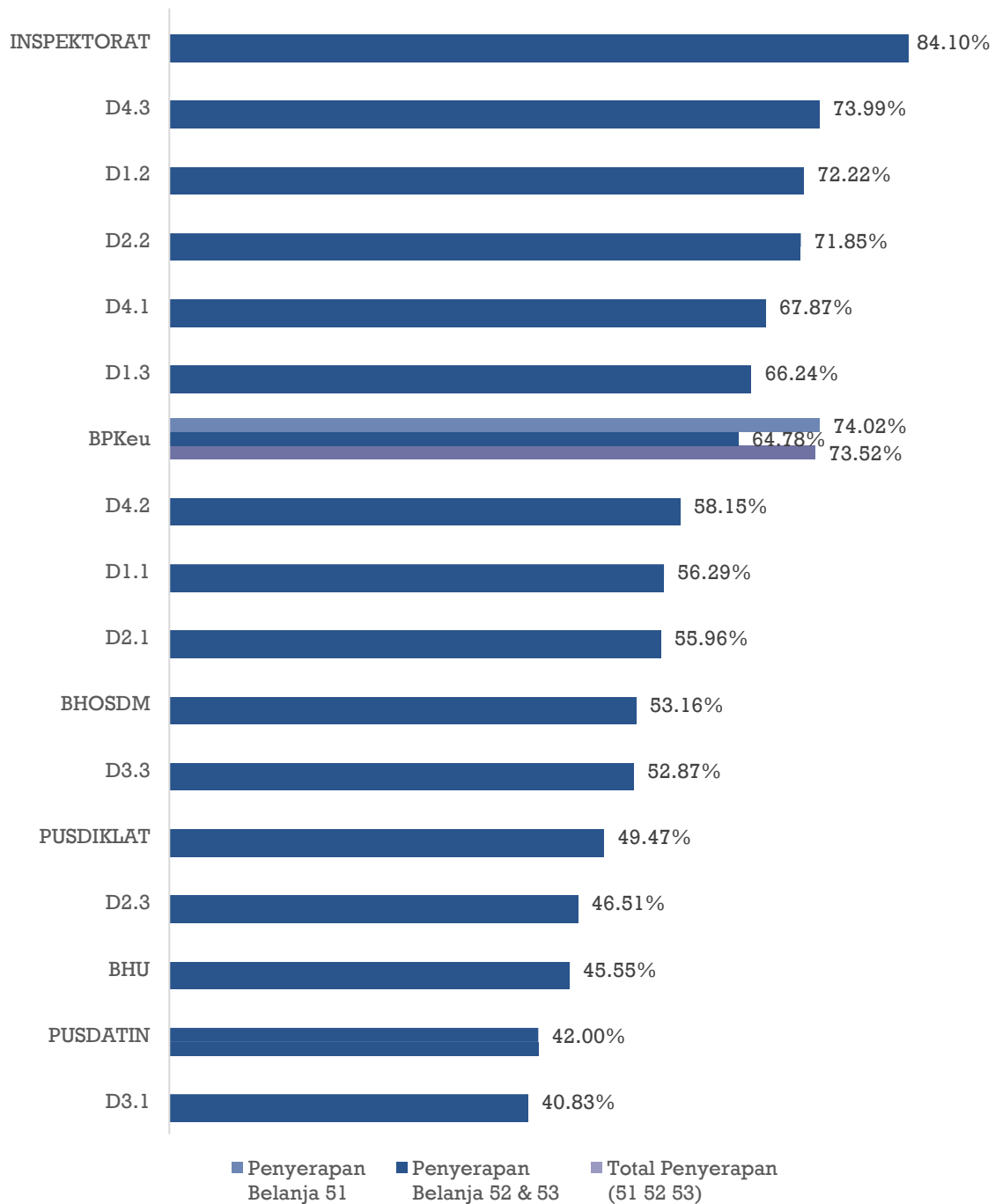


*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 30 September 2024

Sampai dengan 30 September 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran pada Unit Organisasi Eselon I, didapatkan persentase realisasi penyerapan dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 **terbesar** terdapat pada Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan sebesar Rp1.935.131.706 (61,64%) dan **terkecil** terdapat pada Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia sebesar Rp16.356.595.177 (46,73%).



Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. II



*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 30 September 2024

Sampai dengan 31 September 2024, berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran pada Unit Organisasi Eselon II, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 **terbesar** terdapat pada Inspektorat sebesar Rp840.976.320 (84,10%) dan **terkecil** terdapat pada Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan sebesar Rp1.620.901.657 (40,83%).

Perbandingan Rencana Penarikan Dana (RPD) Dengan Realisasi Anggaran

No.	Unit Organisasi	RPD September (Rp)	Realisasi Anggaran September (Rp)	Deviasi (Rp)	% Deviasi*
1	2	3	4	5 = (4 – 3)	6 = (5 / 3)
1	BHOSDM	Rp487.843.000	Rp240.193.519	-Rp247.649.481	-50,76%
2	BHU	Rp6.137.420.614	Rp4.064.473.645	-Rp2.072.946.969	-33,78%
3	BPKEU	Rp242.588.634	Rp339.748.010	Rp97.159.376	40,05%
4	BPKEU (Belanja Pegawai)	Rp4.629.353.909	Rp4.624.822.428	-Rp4.531.481	-0,10%
5	D1.1	Rp2.250.614.329	Rp720.302.641	-Rp1.530.311.688	-68,00%
6	D1.2	Rp245.676.171	Rp161.261.930	-Rp84.414.241	-34,36%
7	D1.3	Rp1.546.636.458	Rp1.155.074.359	-Rp391.562.099	-25,32%
8	D2.1	Rp532.805.068	Rp11.924.082	-Rp520.880.986	-97,76%
9	D2.2	Rp959.490.245	Rp356.657.637	-Rp602.832.608	-62,83%
10	D2.3	Rp1.917.824.964	Rp604.489.906	-Rp1.313.335.058	-68,48%
11	D3.1	Rp135.496.338	Rp86.295.225	-Rp49.201.113	-36,31%
12	D3.3	Rp246.695.000	Rp239.388.042	-Rp7.306.958	-2,96%
13	D4.1	Rp8.810.000	Rp201.517.155	Rp192.707.155	2187,37%
14	D4.2	Rp2.010.962.760	Rp690.493.318	-Rp1.320.469.442	-65,66%
15	D4.3	Rp161.348.560	Rp215.912.461	Rp54.563.901	33,82%
16	Inspektorat	Rp75.826.864	Rp111.723.502	Rp35.896.638	47,34%
17	PUSDATIN	Rp1.012.942.000	Rp1.654.152.572	Rp641.210.572	63,30%
18	PPSDM PBJ	Rp589.468.971	Rp313.289.692	-Rp276.179.279	-46,85%
TOTAL LKPP		Rp23.191.803.884	Rp15.791.720.124	-Rp7.400.083.760	-31,91%

Catatan:

- * 1. Ambang batas deviasi antara RPD dengan realisasi adalah sebesar $\pm 5\%$ untuk nilai maksimum IKPA LKPP;
- 2. Kinerja Unit Organisasi semakin baik bila Persentase Deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran mendekati 0%.
- 3. Persentase Deviasi bernilai positif (+) jika Realisasi Anggaran lebih besar dari RPD
- 4. Persentase Deviasi bernilai negatif (-) jika Realisasi Anggaran lebih kecil dari RPD
- 5. RPD (3) dan Realisasi Anggaran (4) yang ditampilkan merupakan RPD dan penyerapan anggaran parsial bulan September tahun 2024

Realisasi anggaran diluar ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$

Realisasi anggaran masih dalam ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	7
BAB I	10
MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA	10
1.1 ANGGARAN	10
1.1.1 Pagu Anggaran	10
1.1.2 Penyerapan Anggaran.....	11
1.2 PELAPORAN EKSTERNAL	12
1.3.1 Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan.....	12
1.3.2 Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS	13
BAB II	15
MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI	15
2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)	15
A. Capaian Kinerja Fisik	15
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	16
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	16
D. Rekomendasi.....	16
2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)	17
A. Capaian Kinerja Fisik	17
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	18
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	18
D. Rekomendasi.....	19
1.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)	19
A. Capaian Kinerja Fisik	19
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	20
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	21
D. Rekomendasi.....	21
1.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)	21
A. Capaian Kinerja Fisik	21
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	22
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	23
D. Rekomendasi.....	23

1.5	DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)	24
A.	Capaian Kinerja Fisik	24
B.	Capaian Kinerja Anggaran	25
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	25
D.	Rekomendasi	25
1.6	DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)	26
A.	Capaian Kinerja Fisik	26
B.	Capaian Kinerja Anggaran	27
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	27
D.	Rekomendasi	27
1.7	DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)	28
A.	Capaian Kinerja Fisik	28
B.	Capaian Kinerja Anggaran	29
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	29
D.	Rekomendasi	30
1.8	DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)	31
A.	Capaian Kinerja Fisik	31
B.	Capaian Kinerja Anggaran	32
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	32
D.	Rekomendasi	32
1.9	DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)	33
A.	Capaian Kinerja Fisik	33
A.	Capaian Kinerja Anggaran	34
B.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	34
C.	Rekomendasi	35
1.10	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)	36
A.	Capaian Kinerja Fisik	36
B.	Capaian Kinerja Anggaran	37
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	37
D.	Rekomendasi	38
1.11	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)	38
A.	Capaian Kinerja Fisik	38
B.	Capaian Kinerja Anggaran	39

C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	39
D.	Rekomendasi	40
1.12	DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)	41
A.	Capaian Kinerja Fisik	41
B.	Capaian Kinerja Anggaran	42
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	42
D.	Rekomendasi	43
1.13	DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)	43
A.	Capaian Kinerja Fisik	43
B.	Capaian Kinerja Anggaran	44
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	44
D.	Rekomendasi	45
1.14	DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)	47
A.	Capaian Kinerja Fisik	47
B.	Capaian Kinerja Anggaran	48
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	48
D.	Rekomendasi	48
1.15	INSPEKTORAT	49
A.	Capaian Kinerja Fisik	49
B.	Capaian Kinerja Anggaran	49
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	50
D.	Rekomendasi	50
1.16	PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	51
A.	Capaian Kinerja Fisik	51
B.	Capaian Kinerja Anggaran	52
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	52
D.	Rekomendasi	52
1.17	PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)	53
A.	Capaian Kinerja Fisik	53
B.	Capaian Kinerja Anggaran	53
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	54
D.	Rekomendasi	54
BAB III		55
KESIMPULAN		55
A.	Kesimpulan	55

BAB I

MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

1.1 ANGGARAN

1.1.1 Pagu Anggaran

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan Nomor: SP DIPA-DIPA-106.01-0/2024 tanggal 24 Januari 2024, pagu anggaran LKPP Tahun 2024 sebesar Rp244.786.416.000. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	63.885.447.000	26,098%
52 Belanja Barang	157.618.473.000	64,390%
53 Belanja Modal	23.282.496.000	9,511%
TOTAL	244.786.416.000	100.00%

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
SETTAMA	63.885.447.000	56.467.375.000	18.459.548.000	74.926.923.000
BHOSDM	-	6.908.825.000	15.000.000	6.923.825.000
BPKeu	-	3.683.337.000	-	3.683.337.000
BHU	-	45.875.213.000	18.444.548.000	64.319.761.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	63.885.447.000	-	-	63.885.447.000
Kedeputian 1 (D1)	-	26.536.834.000	-	26.536.834.000
D1.1	-	13.666.076.000	-	13.666.076.000
D1.2	-	2.318.730.000	-	2.318.730.000
D1.3	-	10.552.028.000	-	10.552.028.000
Kedeputian 2 (D2)	-	36.079.499.000	253.800.000	36.333.299.000
D2.1	-	3.073.689.000	157.800.000	3.231.489.000
D2.2	-	14.831.835.000	-	14.831.835.000
D2.3	-	18.173.975.000	96.000.000	18.269.975.000
Kedeputian 3 (D3)	-	7.789.260.000	-	7.789.260.000
D3.1	-	3.969.791.000	-	3.969.791.000
D3.3	-	3.819.469.000	-	3.819.469.000
Kedeputian 4 (D4)	-	18.995.772.000	-	18.995.772.000
D4.1	-	3.229.245.000	-	3.229.245.000
D4.2	-	13.665.415.000	-	13.665.415.000
D4.3	-	2.101.112.000	-	2.101.112.000
INSPEKTORAT	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000
PUSLAT	-	3.444.686.000	467.208.000	3.911.894.000
PUSDATIN	-	7.305.047.000	4.101.940.000	11.406.987.000
TOTAL	63.885.447.000	Rp157.618.473.000	Rp23.282.496.000	244.786.416.000

1.1.2 Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan 30 September 2024 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar Rp 142.870.071.016 atau sebesar 58,37%. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	63.885.447.000	47.289.479.068	74,02%	16.595.967.932
52 Belanja Barang	157.618.473.000	93.839.657.737	59,54%	63.778.815.263
53 Belanja Modal	23.282.496.000	1.740.934.211	7,48%	21.541.561.789
Total	244.786.416.000	142.870.071.016	58,37%	101.916.344.984

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
INSPEKTORAT	1,000,000,000	840.976.320	84,10%	159.023.680
SES (Gaji)	63.885.447.000	47.289.479.068	74,02%	16.595.967.932
D1	26.536.834.000	16.356.595.177	61,64%	10.180.238.823
D4	18.995.772.000	11.692.652.291	61,55%	7.303.119.709
D2	36.333.299.000	20.963.066.309	57,70%	15.370.232.691
PUSLAT	3,911,894,000	1.935.131.706	49,47%	1.976.762.294
SES	74,926,923,000	35.361.350.981	47,19%	39.565.572.019
D3	7.789.260.000	3.640.207.702	46,73%	4.149.052.298
PUSDATIN	11.406.987.000	4.790.611.462	42,00%	6.616.375.538
Total	244.786.416.000	142.870.071.016	58,37%	101.916.344.984

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
BHOSDM	Rp6.923.825.000	Rp3.680.646.489	53,16%	Rp3.243.178.511
BHU	Rp64.319.761.000	Rp29.294.690.964	45,55%	Rp35.025.070.036
BPKeu	Rp3.683.337.000	Rp2.386.013.528	64,78%	Rp1.297.323.472
BPKeu (Gaji)	Rp63.885.447.000	Rp47.289.479.068	74,02%	Rp16.595.967.932
D1.1	Rp13.666.076.000	Rp7.692.562.788	56,29%	Rp5.973.513.212
D1.2	Rp2.318.730.000	Rp1.674.507.187	72,22%	Rp644.222.813

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
D1.3	Rp10.552.028.000	Rp6.989.525.202	66,24%	Rp3.562.502.798
D2.1	Rp3.231.489.000	Rp1.808.385.645	55,96%	Rp1.423.103.355
D2.2	Rp14.831.835.000	Rp10.657.411.445	71,85%	Rp4.174.423.555
D2.3	Rp18.269.975.000	Rp8.497.269.219	46,51%	Rp9.772.705.781
D3.1	Rp3.969.791.000	Rp1.620.901.657	40,83%	Rp2.348.889.343
D3.3	Rp3.819.469.000	Rp2.019.306.045	52,87%	Rp1.800.162.955
D4.1	Rp3.229.245.000	Rp2.191.743.074	67,87%	Rp1.037.501.926
D4.2	Rp13.665.415.000	Rp7.946.203.225	58,15%	Rp5.719.211.775
D4.3	Rp2.101.112.000	Rp1.554.705.992	73,99%	Rp546.406.008
INSPEKTORAT	Rp1.000.000.000	Rp840.976.320	84,10%	Rp159.023.680
PUSDATIN	Rp11.406.987.000	Rp4.790.611.462	42,00%	Rp6.616.375.538
PUSLAT	Rp3.911.894.000	Rp1.935.131.706	49,47%	Rp1.976.762.294
Total	244.786.416.000	Rp142.870.071.016	58,37%	Rp101.916.344.984

1.2 PELAPORAN EKSTERNAL

1.3.1 Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan

Aplikasi SMART DJA merupakan sebuah aplikasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L. Aplikasi ini menampilkan hasil nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian/Lembaga dari level Satker, Unit Eselon I hingga level Kementerian/Lembaga. Nilai EKA ini akan digunakan sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.

Pada bulan September 2024 telah dilakukan pengisian dan assesment Rincian Output (RO) pada aplikasi SMART DJA dimana saat ini 70 RO telah dikonfirmasi oleh DJA sebagaimana terdapat pada tampilan berikut:

No.	Program/Regulasi/KRO/RO	Volume	Jenis RO	Cara Pelaporan	Pelaporan Capaian	Pelaporan Waktu	Status Konfirmasi	Tanggal Update
1.	C2 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional K319 Pengkajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ANP Peraturan Pemerintah 113 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (BPP)	Status	Online	Maximize	Stabilized	✓	2024-01-30 14:15:29
2.	C2 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional K319 Pengkajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa ANP Peraturan Presiden 113 Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1,0000 (BPP)	Status	Online	Maximize	Stabilized	✓	2024-01-30 14:15:31
3.	C2 Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional K319 Pengkajian Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	2,0000 (BPP)	Status	Tahapan	Maximize	Stabilized	✓	2024-01-30 14:15:31

Gambar 3. 1 Tampilan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan pada Menu Assessment RO

Sampai dengan saat ini NKA LKPP per September 2024 belum dapat diinformasikan dikarenakan aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja tahun 2024.

1.3.2 Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS

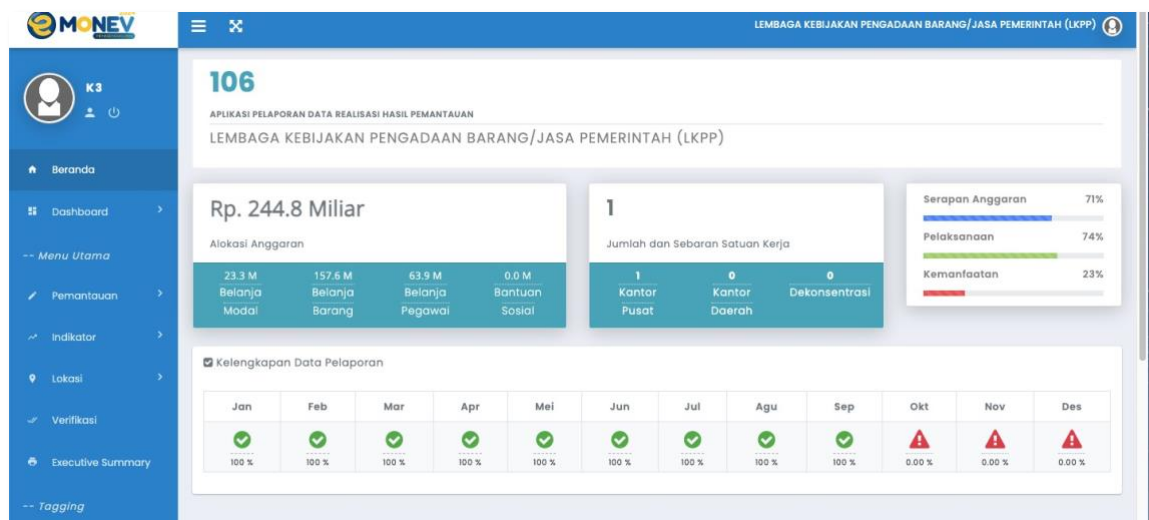
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev bappenas dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut: https://emonev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-eMoney_2021_v1_19032021.pdf.

Pada awal bulan September 2024 (masa pelaporan periode bulan September 2024), aplikasi e-Monev mengalami proses internalisasi hasil interkoneksi dengan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan. Sehubungan dengan proses interkoneksi tersebut terdapat perubahan pada aplikasi e-Monev yang sebelumnya terdapat 3 (tiga) modul pelaporan yaitu, capaian Komponen, Rincian Output (RO) Satker, dan Rincian Output (RO) Renja, berubah menjadi 2 (dua) modul yaitu pelaporan capaian Komponen dan RO Renja.

Sehubungan dengan proses interkoneksi dengan aplikasi SAKTI tersebut, saat ini pada aplikasi e-monev sudah tidak terdapat menu/modul pelaporan progres dan capaian RO Satker, namun pada tampilan *dashboard monitoring* persentase pelaporan kinerja masih memperhitungkan dan menampilkan persentase kelengkapan pelaporan RO Satker, sehingga menyebabkan persentase progres pelaporan pada

aplikasi e-monev BAPPENAS tidak dapat mencapai 100% walaupun sudah dilakukan pelaporan progres dan capaian pada modul Komponen dan RO Renja.



Gambar 3. 2 Tampilan Aplikasi E-Monev Bappenas

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 Rincian Output, dan 9 Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi /Progres
1	8.4 - Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Progres: 75%
		Indeks maturitas SPIP	Predikat: Terdefinisi	Progres: 90%
		Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Predikat: Baik	Progres: 75%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 75%
2.	955-Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	Progres: 75%
3.	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7 Dokumen	Progres: 66%
4.	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	Progres: 80%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan September 2024 adalah 74%.

3. Komponen

Pada tahun 2024, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 75.11%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar 67.568.784.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024, penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	63.885.447.000	47.289.479.068	74.02%	16.595.967.932
52 Belanja Barang	3.683.337.000	2.386.013.528	64.78%	1.297.323.472
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	67.568.784.000	49.675.492.596	73.52%	17.893.291.404

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BPKeu di bulan September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Nilai IKPA pada bulan September yaitu sebesar 95.32 yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan Agustus yaitu sebesar 95.15 (setelah dilakukan koreksi ulang oleh Kementerian Keuangan).
2. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran BPKeu (parsial) sebesar Rp339.748.010 Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp242.588.634 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp97.159.376 atau 40,05%.
3. Pada indikator sasaran kegiatan Indeks maturitas SPIP terdapat permasalahan aplikasi penilaian mandiri SPIP dari BPKP terkadang tidak dapat diakses/eror.
4. Pada Indikator Sasaran Kegiatan Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) mempunyai permasalahan belum muncul sub nilai Capaian Ouput untuk penilaian IKPA bulan September 2024 di laman MONEVPA (<https://spanint.kemenkeu.go.id>). Sehingga nilainya rendah. Penggunaan nilai tersebut hanya untuk sementara.
5. Pada indikator komponen Penyusunan Anggaran terdapat permasalahan yaitu Referensi pada sistem SAKTI belum sesuai dengan updatean Krisna.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.

2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
5. Melakukan koordinasi secara intensif kepada BPKP terkait adanya pembaruan informasi dalam pelaksanaan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi dengan menggunakan aplikasi.

2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 6 indikator sasaran kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.1-Meningkatnya kualitas deregulasi kebijakan	Indeks kualitas kebijakan	Predikat: Baik	Progres: 80%
		Indeks reformasi hukum	Predikat: Istimewa	Progres: 85%
2.	8.2-Terwujudnya penguatan organisasi, tata laksana, dan koordinasi penerapan reformasi birokrasi	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100 Persen	Progres: 75,66%
		Peringkat komposit evaluasi kelembagaan	Skor: 75	Progres: 75,80%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
3.	8.3-Meningkatnya profesionalitas SDM	Indeks profesionalitas ASN LKPP	Predikat: Sangat Tinggi	Progres: 85,75%
		Indeks sistem merit	Predikat: Sangat Baik	Progres: 81,38%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	957-Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 84,52%
2.	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2 Layanan	Progres: 75,80%
3.	961-Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	Progres: 75,66%
4.	969-Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 94,74%
5.	954-Layanan Manajemen SDM	510 Orang	396 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan September 2024 adalah 81,69%.

3. Komponen

Tahun 2024, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 77,76%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran BHOSDM TA 2024 adalah sebesar Rp 6.923.825.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	6.908.825.000	3.667.666.489	53.09 %	3.241.158.511
53 Belanja Modal	15.000.000	12.980.000	86.53%	2.020.000
Total	6.923.825.000	3.680.646.489	53.16 %	3.243.178.511

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan September 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran BHOSDM (parsial) sebesar Rp240.193.519. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp487.843.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp247.649.481 atau -50,76%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator sasaran kegiatan Indeks kualitas kegiatan dan Indeks reformasi hukum.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 7 indikator sasaran kegiatan, 8 indikator Rincian Output, dan 18 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.5-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Nilai: B	Progres: 0%
		Indeks pelayanan publik	Predikat: Sangat Baik	Progres: 0%
		Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks: Informatif	Progres: 95%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
2.	8.6-Meningkatnya kualitas pelayanan umum internal	Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Memuaskan	Progres: 75%
		Indeks tata kelola pengadaan	Predikat: Istimewa	Progres: 75%
		Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan kegiatan pimpinan eselon I	Predikat: Sangat Baik	Progres: 76%
		Indeks kualitas pengelolaan aset	Nilai: 3,05	Progres: 75%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5 Layanan	Progres: 83,12%
2.	956-Layanan BMN	1 Layanan	Progres: 76%
3.	959-Layanan Protokoler	1 Layanan	Progres: 84,78%
4.	962-Layanan Umum	1 Layanan	Progres: 79%
5.	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 79,64%
6.	951-Layanan Sarana Internal	83 Unit	55 Unit
7.	971-Layanan Prasarana Internal	1 Unit	Progres: 0%
8.	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	Progres: 75%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan September 2024 adalah 67.94%.

3. Komponen

Tahun 2024 Biro Hubungan Masyarakat dan Umum memiliki 18 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 73,85%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran BHU TA 2024 adalah sebesar Rp 64.319.761.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	45.875.213.000	28.500.684.714,00	62.13%	17.374.528.286
53 Belanja Modal	18.444.548.000	794.006.250,00	4.3%	17.650.541.750
Total	64.319.761.000	29.294.690.964	45.55%	35.025.070.03

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHU di bulan September 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran BHU (parsial) sebesar Rp4.064.473.645. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp6.137.420.614 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp2.072.946.969 atau -33,78%.
2. Masih terdapat dua indikator sasaran kegiatan yang belum memiliki progres yaitu Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan Indeks pelayanan publik dikarenakan akan dilakukan di akhir tahun.
3. Pada RO Layanan BMN – Komponen 053 Penyusunan laporan BMN telah terdapat realisasi 4 laporan, namun belum terdapat realisasi anggaran pada komponen tersebut.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator sasaran kegiatan yang belum memiliki progres yaitu Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan Indeks pelayanan publik.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 1 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	4 Rancangan Peraturan	2 Rancangan Peraturan

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	111-Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 RPP	Progres: 49,25%
2.	111-Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 R.Perpres	1 R.Perpres Progres: 97,00%
3.	111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rancangan Peraturan	1 Rancangan Peraturan
4.	111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 61,22%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.1 pada bulan September 2024 adalah 75,62%.

3. Komponen

Tahun 2024, D1.1 memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 70,48%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran D1.1 TA 2024 adalah sebesar Rp13.666.076.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	13.666.076.000	7.692.562.788	56,29%	5.973.513.212
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	13.666.076.000	7.692.562.788	56,29%	5.973.513.212

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan September 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran D1.1 (parsial) sebesar Rp720.302.641. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp2.250.614.329 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp1.530.311.688 atau -68,00%.
2. Pada RO dan Komponen "Rancangan Peraturan Presiden tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik" seluruhnya telah tercapai 100%. Saat ini telah selesai dilaksanakan pembahasan harmonisasi dan dalam tahap menunggu pengundangan di Sekretariat Negara.
3. Terdapat indikator yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu:
 - a. RO Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik; dan
 - b. RO Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada:
 - a. RO Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik; dan
 - b. RO Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum.
4. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
5. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang

- besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
6. Mengakselerasi kegiatan dan pertanggungjawaban guna meningkatkan nilai penyerapan anggaran.

2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	3 Dokumen	Progres: 80,00%
		Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD	3 Dokumen	2 Dokumen
		Badan Hukum Publik dan Desa		

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	125-Pedoman/Model Dokumen KSO BLUD dan Kerjasama BUMD	2 NSPK	Progres: 80,00%
2.	124-Model Dokumen PBJ Khusus	3 NSPK	Progres: 80,00%
3.	123-Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus	14 Lembaga	8 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.2 pada bulan September 2024 adalah 80,00%.

3. Komponen

Tahun 2024, D1.2 memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 74,22%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu D1.2 TA 2024 adalah sebesar Rp2.318.730.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.318.730.000	1.674.507.187	72,22%	644.222.813
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.318.730.000	1.674.507.187	72,22%	644.222.813

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran D1.2 (parsial) sebesar Rp161.261.930. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp245.676.171 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp84.414.241 atau -34,36%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	1.1-Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	397 Pelaku Usaha	364 Pelaku Usaha
2.	4.1-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah rekomendasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kerjasama Internasional	4 Dokumen	2 Dokumen
		Jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJP	2 NSPK	Progres: 69,00%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	132-Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	4334 UMKM	4307 UMKM
2.	131-Kerjasama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Negara Mitra/Organisasi Internasional/Lembaga Internasional	3 Kesepakatan	2 Kesepakatan
3.	131-NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 NSPK	3 NSPK
4.	131-NSPK Pengadaan Barang/Jasa dalam Kerangka Kerjasama Internasional	2 NSPK	Progres: 69,00%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.3 pada bulan September 2024 adalah 72,75%.

3. Komponen

Tahun 2024, D1.3 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 66,36%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu D1.3 TA 2024 adalah sebesar Rp10.552.028.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	10.552.028.000	6.989.525.202	66,24%	3.562.502.798
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	10.552.028.000	6.989.525.202	66,24%	3.562.502.798

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan September 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran D1.3 (parsial) sebesar Rp1.155.074.359. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.546.636.458 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp391.562.099 atau -25,32%.
2. Terdapat indikator yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu:
 - a. Indikator sasaran kegiatan jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJ; dan
 - b. RO NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada:
 - a. Indikator sasaran kegiatan jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJ; dan
 - b. RO NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:

- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
5. Mengakselerasi kegiatan dan pertanggungjawaban guna meningkatkan nilai penyerapan anggaran.

2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi sistem informasi rencana umum pengadaan dengan sistem informasi lainnya	2 Segmen	Progres: 77.90 Persen
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya	3 Segmen	Progres: 70 Persen
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan	624 K/L/Pemda	564 K/L/Pemda
2.	5.2-Terselenggaranya monitoring dan evaluasi PBJ	Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah	80 Persen	Progres: 25 Persen

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	211-Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 77.90 Persen
2.	212-Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 70 Persen
3.	211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	2 Laporan	Progres: 61.67 Persen

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.1 pada bulan September 2024 adalah 69.86%.

3. Komponen

Tahun 2024, D2.1 memiliki 11 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 72.56%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran D2.1 TA 2024 adalah sebesar Rp3,231,489,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3,073,689,000	1,808,385,645	58.83%	1,265,303,355
53 Belanja Modal	157,800,000	-	0%	157,800,000
Total	3,231,489,000	1,808,385,645	55.96%	1,423,103,355

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi penyerapan anggaran D2.1 (parsial) adalah sebesar Rp11,924,082. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp532,805,068 sehingga memiliki deviasi sebesar minus (-) Rp520,880,986 atau minus (-) 97.76%.
2. Terdapat kendala pada Sasaran Kinerja Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik, Indikator Jumlah K/L/Pemda Yang Memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan terdapat kendala bahwa 1 lembaga yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang input RUP sebagai Satker Kemendagri dan 1 Pemda yakni Kabupaten Waropen yang belum mengumumkan RUP pada SIRUP.
3. Terdapat indikator kinerja yang pencapaian fisiknya perlu ditingkatkan yaitu:

- a. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya monitoring dan evaluasi PBJ, Indikator Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan
- b. RO Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP.
- 4. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
 - a. Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi.
 - b. Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah, dan
 - b. RO Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
5. Terhadap kendala yang dialami pada Sasaran Kinerja Terpenuhinya Penguatan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik indikator Indikator Jumlah K/L/Pemda Yang Memanfaatkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan dapat disampaikan rekomendasi, terhadap K/L dan Pemda yang terkendala dalam mengumumkan RUP pada SIRUP untuk menghimbau dan melakukan pendampingan bagi K/L dan Pemda untuk dapat menayangkan RUP pada aplikasi SIRUP.

6. Mendorong kegiatan sosialisasi kepada seluruh K/L/Pemda untuk dapat disiplin dan melakukan pendampingan dalam melakukan input rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP.
7. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) memiliki 5 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 5 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat	450 LPSE	410 LPSE
		Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya	3 Segmen	Progres: 30%
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non e-purchasing	450 K/L/Pemda	20 K/L/Pemda
2.	5.3-Terwujudnya tata kelola sistem informasi pengadaan digital yang andal	Jumlah LPSE yang memenuhi maturitas tata kelola LPSE	273 LPSE	265 LPSE
		Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem informasi pengadaan digital	100 Persen	Progres: 75%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	231-SPSE Terpusat	450 Layanan	410 Layanan
2.	234-Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang Memiliki Maturitas Tata Kelola	273 Unit Kerja	265 Unit Kerja

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.2 pada bulan September 2024 adalah 74,9%.

3. Komponen

Tahun 2024, D2.2 memiliki 8 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 65,49%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran D2.2 TA 2024 adalah sebesar Rp14,831,835,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	14.831.835.000	10.657.411.445	71.85%	4.174.423.555
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	14.831.835.000	10.657.411.445	71.85%	4.174.423.555

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.2 di bulan September 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran D2.2 (parsial) sebesar Rp356.657.637 Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp959.490.245 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp602.832.608 atau -62,83%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
- c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

2.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pasar Digital Pengadaan (D2.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	2.1-Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah	Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik	10.000.000 PDN	8.928.502 PDN
		Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik	4.500.000 Produk UMK-K	8.323.586 Produk UMK-K
2.	5.1-Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik	Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya	1 Segmen	4 Segmen
		Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing	450 K/L/Pemda	631 K/L/Pemda

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1	221-Pedoman Sistem Katalog dan E-Purchasing	2 Pedoman	1 Pedoman
2.	221-Produk yang Masuk E-Catalogue	10.000.000 Produk	8.928.502 Produk
3.	221-Sistem E-Purchasing Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 75%
4.	221-Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik	1 Laporan	Progres: 75%

Rata-rata progres Rincian Ouput (RO) D2.3 pada bulan September 2024 adalah 70.08%.

3. Komponen

Tahun 2024 D2.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 69.25%.

A. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran D2.3 TA 2024 adalah sebesar Rp18,269,975,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18,173,975,000	8,440,369,219	46.44%	9,733,605,781
53 Belanja Modal	96,000,000	56,900,000	59.27%	39,100,000
Total	18,269,975,000	8,497,269,219	46.51%	9,772,705,781

B. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan September 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024 realisasi penyerapan anggaran D2.3 (parsial) adalah sebesar Rp604,489,906, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1,917,824,964 sehingga memiliki deviasi minus (-) Rp1,313,335,058 atau minus (-) 68.48%.
2. Masih terdapat kendala yang sama seperti pada bulan-bulan sebelumnya, antara lain:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan "Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik", pada Indikator "Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya" yang status saat ini masih menunggu MoU/PKS dengan kemenESDM terkait integrasi dengan SHE, dan Kementerian Agama terkait integrasi data Sertifikat Halal.
 - b. Pada RO "Sistem E-Purchasing Terintegrasi", terdapat kendala bahwa perlu menunggu MoU/PKS dengan KemenESDM terkait integrasi data SHE, MoU/PKS dengan Kementerian Agama terkait integrasi data sertifikat halal serta penggunaan e-purchasing oleh non K/L/PD (BUMN/BUMD/BLU/BLUD/BUMDes/BUMDesma).

3. Terdapat kinerja yang realisasinya sampai dengan bulan September 2024 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. SK "Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah", indikator Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik yang telah terealisasi 8.323.586 produk UMK-K, dari target sebesar 4.500.000 produk UMK-K,
 - b. SK "Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik" pada indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya telah terealisasi sebanyak 4 Segmen, dari target sebanyak 1 Segmen,
 - 2) Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing telah terealisasi sebanyak 631 K/L/Pemda, dari target sebanyak 450 K/L/Pemda
4. Terdapat 2 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu:
 - a. Produk yang Masuk *e-Catalogue*; dan
 - b. Sistem *e-Purchasing* Terintegrasi

C. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara

realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

4. Terhadap Indikator Sasaran Kegiatan "Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan Epurchasing dengan sistem lainnya", unit organisasi diharapkan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengakselerasi penyelesaian MoU/Perjanjian Kerja Sama.
5. Terhadap RO Sistem e-Purchasing Terintegrasi, agar senantiasa berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka akselerasi penyusunan MoU/Perjanjian Kerja Sama yang dibutuhkan untuk pelaksanaan integrasi sistem serta koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait dengan penyusunan aturan terbaru mengenai penggunaan *e-purchasing* oleh non K/L/PD.
6. Terkait dengan 3 indikator Sasaran Kinerja yang realisasinya telah melebihi target, agar menginformasikan dan berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang telah tercapai di bulan September 2024. Mengingat bahwa capaian ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.
7. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 3 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	7.600 Orang	9.634 Orang
		Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK	7.975 Orang	13.838 Orang
2.	6.2-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	Persentase pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ	70 Persen	Progres: 85%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/ Progres
1	311-Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 90%
2.	311-SDM JF PPBJ	7.600 Orang	9.634 Orang
3.	311-UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	382 Lembaga	415 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.1 pada bulan September 2024 adalah 92,9%.

3. Komponen

Tahun 2024, D3.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 80,67%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran D3.1 TA 2024 adalah sebesar Rp3,969,791,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	Rp3,969,791,000	Rp1.620.901.657	38.66%	Rp2.348.889.343
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	Rp3,969,791,00	Rp1.620.901.657	40.83%	Rp2.348.889.343

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan September 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran D3.1 (parsial) sebesar Rp86.295.225. Realisasi ini lebih Kecil dari RPD sebesar Rp135.496.338 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp49.201.113 atau -36,31%%

2. Masih terdapat permasalahan pada RO Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: finalisasi peraturan induk masih dalam proses dan belum selesai.
3. Terdapat 2 indikator Sasaran Kinerja yaitu Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda dan Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK serta 1 Rincian Output pada SDM JF PPBJ yang realisasinya telah melebihi target.
4. Terdapat 1 indikator Rincian Output (RO) yang mendukung program Prioritas Nasional LKPP yaitu UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3).

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu;
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
3. Terkait permasalahan pada RO Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar proses penyusunan tetap dilaksanakan secara paralel sembari menunggu finalisasi peraturan induk.
4. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Rincian Output yang menjadi program Prioritas Nasional agar target tercapai tepat waktu, mengingat RO yang mendukung PN dilakukan evaluasi secara berkala oleh BAPPENAS.

2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 6 indikator Rincian Output, dan 17 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi	5.480 Orang	6.224 Orang
		Keterandalan sistem sertifikasi kompetensi	92%	95%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	34 Lembaga	21 Lembaga
2.	331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	75 Orang	Progres: 94.67%
3.	331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ	5.480 Orang	6.224 Orang
4.	331-Pedoman Sertifikasi PBJP	1 Pedoman	Progres: 80%
5.	332-Materi Uji Sertifikasi PBJP	20 NSPK	17 NSPK
6.	331-Sarana Sertifikasi PBJP	196 Unit	144 Unit

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.3 pada bulan September 2024 adalah 76.35%.

3. Komponen

Tahun 2024 D3.3 memiliki 18 Komponen dari 6 Rincian Output dan rata-rata progres komponen pada bulan September 2024 adalah 74,39%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran D3.3 TA 2024 adalah sebesar Rp3.819.469.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.819.469.000	2.019.306.045	52.87%	1.800.162.955
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.819.469.000	2.019.306.045	52.87%	1.800.162.955

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan September 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran D3.3 (parsial) sebesar Rp239.388.042. Realisasi ini lebih kecil dari RPD sebesar Rp246.695.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp7.306.958 atau -2.96%.
2. Terdapat permasalahan pada Rincian Output Pedoman Sertifikasi PBJP yaitu:
 - a) Pada Pedoman Sertifikasi PBJP Terdapat perubahan personel sehingga perlu diajukan lagi perubahan SK Komite.
 - b) Pada Sarana Sertifikasi PBJP :
 - Terdapat perbedaan pada Source Code Dev PPSPDM dari Git Pusdatin dengan Production PPSPDM existing. Sehingga, terkendala pada pengembangan fitur TUK karena perlu dilakukan koordinasi untuk melakukan penyesuaian Source Code.
 - Kesulitan pengambilan dan visualisasi data pemilik sertifikat berdasar instansi, dikarenakan input instansi peserta ujian di Portal PPSPDM yang belum terintegrasi dengan BKN dan masih menggunakan kolom freetext.
 - Kendala pada Jaringan LKPPID maupun LKPP Guest yang tidak stabil.
 - Kesulitan peserta ujian untuk melakukan registrasi akun di Portal PPSPDM, serta kesulitan dalam pengambilan dan visualisasi data pemilik sertifikat berdasar sebaran wilayah instansi, yang keduanya dikarenakan perubahan kode wilayah Kemendagri dari pemekaran wilayah.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a) Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan

- c) Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
- 4. Pada RO Pedoman Sertifikasi PBJP yaitu:
 - a) Melakukan tindak lanjut terkait dengan perubahan SK Komite dan mengajukan draf SK Komite kepada pimpinan.
 - b) Melakukan Koordinasi dan tindak lanjut dengan Tim Pusdatin Terkait perbedaan pada Source Code Dev PPSDM dari Git Pusdatin dengan Production PPSDM existing.
 - c) Melakukan Koordinasi dengan bersurat ke BKN terkait integrasi data instansi pada portal ppsdm.lkpp.go.id dengan data instansi dari portal BKN.
 - d) Melakukan Koordinasi dengan Tim Pusdatin agar kendala pada Jaringan LKPPID maupun LKPP Guest dapat cepat teratasi.

2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	3.1- Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	68 K/L	32 K/L
		Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	60 K/L	32 K/L
2.	7.1-Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di K/L	Jumlah K/L yang menyelenggarakan clearing house yang efektif	50 K/L	48 K/L
		Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	16 K/L	15 K/L

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/ Progres
1.	411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	68 K/L	45 K/L
2.	412-Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	20 K/L	15 K/L
3.	413-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi	16 K/L	15 K/L

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.1 pada bulan September 2024 adalah 75%.

3. Komponen

Tahun 2024, D4.1 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen sebesar 75%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran D4.1 TA 2024 adalah sebesar Rp 3.229.245.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.229.245.000	2.191.743.074	67.87%	1.037.501.926
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.229.245.000	2.191.743.074	67.87%	1.037.501.926

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran D4.1 (parsial) sebesar Rp201.517.155. Realisasi ini lebih tinggi dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp8.810.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp192.707.155 atau 2187,37%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran tetap dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	3.2-Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	530 Pemda	537 Pemda
		Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	538 Pemda	538 Pemda
2.		Jumlah Pemda yang menyelenggarakan	100 Pemda	94 Pemda

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
	7.2-Meningkatnya <i>clearing house</i> , konsolidasi, dan <i>probity advice</i> di Pemda	<i>clearing house</i> yang efektif		
		Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>	50 Pemda	31 Pemda

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	538 Pemda	441 Pemda
2.	422- Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	100 Pemda	94 Pemda
3.	423-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan <i>Probity Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	50 Pemda	31 Pemda

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.2 pada bulan September 2024 71,32%.

3. Komponen

Tahun 2024, D4.2 memiliki 9 Komponen dari 3 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 59,07%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran D4.2 TA 2024 adalah sebesar Rp 18.663.984.000,. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	18.663.984.000	7.946.203.225	58.15%	5.719.211.775
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	18.663.984.000	7.946.203.225	58.15%	5.719.211.775

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran D4.2 (parsial) sebesar Rp690.493.318. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar

Rp2.010.962.760 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp1.320.469.442 atau sebesar -65,66%.

2. Pada Rincian Output 6322.FAI-Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan, komponen 053, telah terdapat realisasi dan capaian kinerja, tetapi belum terdapat realisasi anggaran pada komponen tersebut.
3. Terdapat permasalahan yang sama pada indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN”, indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K” bahwa Hingga bulan September 2024, jumlah Pemda yang membelanjakan anggarannya untuk PDN minimal 80% sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Tetapi nilai ini belum final, karena pembagiannya merupakan nilai transaksi yang terus bergerak dan baru akan selesai di akhir tahun. Belanja PDN akan memasuki finalisasi pada TW IV.
4. Terdapat Permasalahan pada indikator Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan *Clearing House*”, antara lain adalah:
 - a. Belum semua Pemda terinformasikan terkait dengan adanya forum *Clearing House*, baik tata cara pembentukan, anggota yang terlibat, serta honorarium yang didapat.
 - b. Belum ada regulasi yang mewajibkan pembentukan *clearing house*, sehingga perlu upaya yang lebih besar untuk meyakinkan Pemda dalam membentuk forum *clearing house*.
 - c. Pemda masih belum terdorong untuk membentuk *Clearing House* karena beberapa faktor, seperti anggaran, kompetensi SDM, dan merasa bahwa penyelesaian permasalahan pengadaan harus melalui LKPP.
5. Terdapat permasalahan pada indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau *Probitry Advice*” dan indikator Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan *Probitry Advice*, Konsolidasi dan/atau Advokasi” yaitu:
 - a. Belum ada pemetaan mendalam terhadap komoditas potensial antar OPD yang dapat dikonsolidasikan.
 - b. Adanya kendala intervensi non-teknis dalam pelaksanaan konsolidasi Pemda, terutama jika melihat potensi lingkup konsolidasi yang luas (tingkat kota/kabupaten atau provinsi).

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2. Meningkatkan kinerja pencapaian fisik pada indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice” dan Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi”.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$) serta memperhatikan realisasi anggaran agar sesuai dengan komponen pelaksanaannya.
4. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
5. Terhadap indikator Sasaran Kegiatan “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN”, “Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K” dapat dilakukan antara lain:
 - a. Melakukan pemetaan serta monitoring secara berkala kepada Pemerintah Daerah yang belum menerapkan belanja PDN dan UMK sesuai dengan kriteria minimalnya.
 - b. Mendorong pencatatan belanja pengadaan secara berkala kepada Pemerintah Daerah terutama untuk belanja pengadaan PDN dan UMK melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis lainnya.
 - c. Mendorong peningkatan jumlah dan kualitas produk PDN dan UMK kepada pemangku kepentingan seperti Kemenperin, Kemendag, Kemenkop UKM, dan berkoordinasi dengan direktorat terkait di LKPP.
6. Terhadap Indikator Rincian Output “Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ”, agar dapat menyusun jadwal sosialisasi serta melaksanakan kegiatan sosialisasi berdasarkan jadwal dan pemetaan terhadap Pemerintah Daerah yang belum menerapkan belanja PDN dan UMK sesuai dengan kriteria minimal.
7. Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan *awareness* kepada Pemerintah Daerah, seperti pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis, yang di dalamnya melibatkan Pemerintah Daerah yang telah berhasil terkait:
 - a. Penyelenggaraan *Clearing House* yang efektif;
 - b. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan; dan
 - c. Layanan *probity advice* oleh LKPP beserta persyaratan yang harus dipenuhi.

2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 14 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	7.3-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	Persentase perkara/permasalahan PBJP yang terlayani	100 Persen	Progres: 64%
		Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS	50 /K/L/Pemda	50 K/L/Pemda
		Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya	65 APIP K/L/Pemda	65 APIP K/L/Pemda
		Jumlah Provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli yang optimal	15 Provinsi	12 Provinsi

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	431-Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk	2 Orang	2 Orang
2.	432-Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk	50 Orang	43 Orang
3.	431-Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	360 Perkara	362 Perkara
4.	432-Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS	25 Perkara	9 Perkara
5.	431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	9 Lembaga	9 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.3 pada bulan September 2024 adalah 90,11%.

3. Komponen

Tahun 2024, D4.3 memiliki 14 Komponen dari 5 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 90,33%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran D4.3 TA 2024 adalah sebesar Rp 2.101.112.000,-. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.101.112.000	1.554.705.992	73.99%	546.406.008
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.101.112.000	1.554.705.992	73.99%	546.406.008

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran D4.3 (parsial) sebesar Rp215.912.461. Realisasi ini lebih tinggi dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp161.348.560, sehingga memiliki deviasi sebesar Rp54.563.901 atau sebesar 33,82%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

2.15 INSPEKTORAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024 Inspektorat memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 1 indikator Rincian Output, dan 4 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	8.8-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi	Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Level 3	Progres: 85%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP	85 Persen	Progres: 56.25 %
		Survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap pengawasan internal	Predikat: Sangat Memuaskan	Progres: 77%
		Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Predikat: Sangat Baik	Progres: 78%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	965-Layanan Audit Internal	12 Dokumen	Progres: 84.10%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan September 2024 adalah 84.1%.

3. Komponen

Tahun 2024. Inspektorat memiliki 4 Komponen dari 1 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 82.75%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran Inspektorat TA 2024 adalah sebesar Rp1.000.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
52 Belanja Barang	1.000.000.000	840.976.320	84.1%	159.023.680
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.000.000.000	840.976.320	84.1%	159.023.680

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan September 2024 sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran Inspektorat (parsial) sebesar Rp111.723.502. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp75.826.864. sehingga memiliki deviasi sebesar Rp35.896.638 atau 47.34%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2024, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) memiliki 4 indikator sasaran kegiatan, 7 indikator Rincian Output, dan 19 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1.	6.1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah peserta pelatihan fungsional pengelola PBJ dan peserta pelatihan teknis kompetensi PBJ yang terlatih	19.600 Orang	17.961 Orang
		Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih	4.250 Orang	5.256 Orang
		Jumlah sumber daya pengelola fungsi PBJ yang lulus sertifikasi kompetensi	12.000 Orang	11.554 Orang
		Persentase peningkatan kualitas pelatihan	85 Persen	84.32 Persen

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	511-LPPBJ yang Terakreditasi	80 Lembaga	80 Lembaga
2.	511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	7 NSPK	Progres: 70%
3.	512-Pedoman Pelatihan PBJ	3 Pedoman	1 Pedoman
4.	511-Media Pembelajaran Berbasis TIK	5 Paket	3 Paket
5.	511-Peserta Pelatihan PBJ Teknis	22.950 Orang	20.377 Orang
6.	512-Peserta Pelatihan PBJ Fungsional	1.400 Orang	1.265 Orang
7.	512-Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan PBJP	2 Laporan	Progres: 1 Laporan

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Puslat SDM PBJ pada bulan September 2024 adalah 76,71%.

3. Komponen

Tahun 2024, Puslat SDM PBJ memiliki 19 Komponen dari 7 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 72,56%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran Puslat SDM PBJ TA 2024 adalah sebesar Rp3.911.894.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.444.686.000	1.729.988.906	50.22%	1.714.697.094
53 Belanja Modal	467.208.000	205.142.800	43.91%	262.065.200
Total	3.911.894.000	1.621.842.014	41.46%	2.290.051.986

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Puslat SDM PBJ di bulan September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024 realisasi penyerapan anggaran Puslat SDM PBJ (parsial) adalah sebesar Rp313.289.692 Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp589.468.971 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp276.179.279 atau -46,85%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan RPD maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)

A. Capaian Kinerja Fisik

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 8 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	8.7-Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif	Predikat SPBE	Predikat: Baik	Progres: 75%

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2024	Realisasi
1.	963-Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Progres: 75%
2.	963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1 Layanan	Progres: 75%
3.	963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	16 Unit	Progres: 75%
4.	963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Sistem Informasi	Progres: 75%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusdatin pada bulan September 2024 adalah 75%.

3. Komponen

Tahun 2024, Pusdatin memiliki 9 Komponen dari 4 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 75%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan revisi anggaran ke-16, pagu anggaran Pusdatin TA 2024 adalah sebesar Rp11.406.987.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan September 2024 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	7.305.047.000	4.118.706.301	56.38%	3.186.340.699
53 Belanja Modal	4.101.940.000	671.905.161,	16.38%	3.430.034.839
Total	11.406.987.000	4.790.611.462	42%	6.616.375.538

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan September 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan September 2024 realisasi penyerapan anggaran Pusdatin (parsial) adalah sebesar Rp1.654.152.572. Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.012.942.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp641.210.572 atau 63,30%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit organisasi harus melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) disesuaikan dengan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
3. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
 - c. Melakukan identifikasi dan perencanaan pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

BAB III

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan September 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada tahun 2024, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp244.786.416.000 dan sampai dengan bulan September 2024 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp 142.870.071.016 (58,37%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	63.885.447.000	47.289.479.068	74,02%	16.595.967.932
52 Belanja Barang	157.618.473.000	93.839.657.737	59,54%	63.778.815.263
53 Belanja Modal	23.282.496.000	1.740.934.211	7,48%	21.541.561.789
TOTAL	244.786.416.000	142.870.071.016	58,37%	101.916.344.984

2. Pada bulan September 2024, realisasi anggaran LKPP (parsial) sebesar Rp15.791.720.124. Realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan September 2024 sebesar Rp23.191.803.884, sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp7.400.083.760 atau -31,91%.
3. Unit organisasi yang memiliki deviasi RPD masih dalam ambang batas ($\pm 5\%$) adalah Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3), sedangkan unit organisasi lainnya memiliki deviasi RPD di luar ambang batas ($\pm 5\%$).
4. Nilai IKPA LKPP bulan September 2024 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 95.32 yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 sebesar 95.15.
5. Terdapat indikator yang realisasinya telah melebihi target, yaitu:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan
 - Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik
 - Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya
 - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan *E-purchasing*
 - Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda
 - Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK
 - Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN
 - Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS

- Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki Sistem Pengaduan dan ditingkatkan kapasitasnya
 - Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi
 - Keterandalan sistem sertifikasi kompetensi
 - Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K
 - Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih
- b. Indikator Rincian Output
- SDM JF PPBJ
 - UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3
 - Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk
 - Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak
 - Peserta Sertifikasi SDM PBJ
 - Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani
 - LPPBJ yang Terakreditasi
6. Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja LKPP, setiap pimpinan unit organisasi agar:
- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
 - b. Merencanakan dan mengupayakan percepatan kegiatan serta penyelesaian proses pertanggungjawaban anggaran yang belum mencapai target pada Triwulan III, sehingga realisasi penyerapan anggaran dapat ditingkatkan dan mencapai target pada Triwulan IV;
 - c. Meningkatkan pencapaian kinerja fisik pada indikator yang masih perlu ditingkatkan dan masih belum berprogres;
 - d. Memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing (Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen);
 - e. Berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing untuk mengoptimalkan efektivitas waktu penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan mekanisme langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Dirktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-13/PB/2024 yang telah disosialisasikan kepada seluruh PPK dan Staf PPK di LKPP;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan

- g. Menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode September 2024 dan melaporkan progres tindaklanjut melalui Aplikasi SiREMON.

